

**PENGARUH PENEGAKAN PERATURAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN
GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KECURANGAN (FRAUD)
PADA SEKTOR PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak)**

Randi¹⁾, Yesi Mutia Basri²⁾, Atika Zarefar²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : tendourandi461@gmail.com

*THE EFFECT OF REGULATION ENFORCEMENT, ORGANIZATIONAL COMMITMENT,
AND LEADERSHIP STYLE ON FRAUD IN THE GOVERNMENT SECTOR
(Empirical Study on Siak Regency Government)*

ABSTRACT

This study is to test the influence of (1) Regulation Enforcement, (2) Organizational Commitment, and (3) Leadership style on fraud in the government sector of the study in the Siak Regency OPD. In this study, the sample population was 43 regional apparatus organizations. Sampling using Purposive Sampling. Data analysis used in this study was using multiple regression analysis techniques with a statistical approach operated through the SPSS program. The results of this study concluded that (1) Regulation Enforcement, (2) Organizational Commitment, and (3) Leadership style have an effect on fraud in the government sector

Keywords: Fraud, Regulation Enforcement, Organizational Commitment, Leadership Style

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat saat ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi sumber masalah kecurangan (fraud) yang sangat kompleks seperti misalnya korupsi, penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Banyak kasus kecurangan yang akhirnya terungkap di Indonesia. Dalam konteks akuntansi, kecurangan didefinisikan sebagai salah satu laporan keuangan yang disengaja (Albrecht et al., 2011). Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Adapun tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316), sering disebut dengan segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) yaitu

sikap, tekanan, dan kesempatan (Arens, 2008).

Pada sektor publik, alat komunikasi dengan masyarakat adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berisi mengenai kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan. Kecurangan dalam sektor publik merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan lemahnya budaya integritas dalam organisasi pemerintahan. Di Indonesia, kecurangan sering kali terwujud dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan berbagai aktor di lingkungan birokrasi dan lembaga negara. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan

tata kelola dan penguatan akuntabilitas, praktik kecurangan tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Korupsi masih menjadi permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya reformasi birokrasi dan penegakan peraturan telah dilakukan, seperti praktik penyalahgunaan wewenang..

Rentetan kasus korupsi yang terungkap antara tahun 2021 hingga 2025 mencerminkan lemahnya integritas institusi publik dan rendahnya efektivitas sistem pengawasan internal di berbagai tingkatan pemerintahan. Beberapa kasus besar, seperti korupsi dalam tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp8 triliun, serta skandal ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan oknum pengadilan, menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada level birokrasi teknis, tetapi juga melibatkan aktor-aktor strategis di lingkup kementerian, lembaga peradilan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelidikan terhadap penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan korupsi pengadaan di PT Taspen semakin menegaskan bahwa korupsi telah merasuki berbagai sektor (CNNIndonesia.com, 2023).

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak menjadi sorotan setelah Kepala Pelaksananya, Kaharuddin, terlibat dalam kasus korupsi dana penanggulangan bencana tahun anggaran 2022. Metode yang dilakukan meliputi pengumpulan dana dari berbagai kegiatan penanggulangan bencana untuk kepentingan pribadi serta pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp1,1 miliar (Suara.com, 2025). Proses hukum terhadap Kaharuddin berujung pada vonis enam tahun penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp829 juta subsider dua

setengah tahun penjara. Selain itu, dua terdakwa lainnya, yaitu Alzukri (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Siak) dan Budiman (Direktur CV Budi Dwika Karya), juga dijatuhi hukuman atas keterlibatan mereka. (Rakyat45.com,2025).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan pada sektor pemerintah yaitu Penegakan Peraturan, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan. Namun hasil penelitian sebelumnya terikat pengaruh faktor-faktor tersebut masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penegakan Peraturan Berpengaruh terhadap Kecurangan pada OPD Kabupaten Siak?
2. Apakah Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kecurangan pada OPD Kabupaten Siak?
3. Apakah Gaya Kepemimpinan Berpengaruh terhadap Kecurangan pada OPD Kabupaten Siak?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Penegakan Peraturan Berpengaruh terhadap Kecurangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kecurangan.

Tinjauan Teori

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory Penelitian ini menggunakan teori Fraud Triangle sebagai dasar teori utama. Berdasarkan teori ini ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Ketiga faktor tersebut sering disebut dengan istilah

segitiga kecurangan yang terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Dalam Tuanakotta (2007:105) menjelaskan bahwa Fraud Triangle adalah model untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan pekerjaan termasuk korupsi. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953). Cressey dalam Tuanakotta (2007:105) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).

Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Menurut Ikhsan & Ishak (2005, hlm. 55) perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor kemampuan usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Pada teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian. Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal dan tempat pengendalian eksternal. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu secara personal memengaruhi kinerja serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendalinya. Teori atribusi ini memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkah laku manusia. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertingkah laku. Menurut Morissan (2013, hlm.75) Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri

atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain.

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecurangan

Menurut Huda (dalam Chandra dkk., 2015), peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku. Dalam konteks organisasi, peraturan berperan sebagai pedoman dan alat pengendali yang mengarahkan perilaku anggota organisasi agar berjalan sesuai dengan nilai, norma, dan tujuan yang ditetapkan. Penegakan peraturan secara tegas dan konsisten sangat penting dalam membangun moralitas manajemen dan individu di dalam organisasi. Ketaatan terhadap peraturan merupakan dasar bagi pegawai dalam berkontribusi positif ke instansi.

Pegawai yang memiliki tingkat ketaatan tinggi terhadap peraturan cenderung akan menghindari perilaku menyimpang atau merugikan organisasi. Sebaliknya, pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan tindakan kecurangan. Dalam hal ini, penegakan peraturan bertindak sebagai mekanisme pencegahan terhadap kecurangan, dengan cara mempersempit “kesempatan” untuk melakukan *fraud*. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengawasan dan penegakan peraturan yang efektif dapat memperkecil ruang gerak bagi oknum yang melakukan kecurangan.

Penelitian Pratiwi dan Muslim (2024) menemukan bahwa penegakan peraturan yang efektif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada laporan keuangan di Pemerintah Kota Padang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Saputro (2020) yang menunjukkan bahwa penegakan peraturan berkontribusi dalam menekan kecurangan pada instansi pemerintahan di Mojokerto.

H1: Penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan

Menurut Adi, Komala, dan Arum (2016), komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai mengenai kepercayaan, keterlibatan, serta loyalitas terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Dalam konteks instansi pemerintah, komitmen ini menjadi krusial karena pegawai yang merasa terikat secara emosional dan profesional terhadap organisasi cenderung lebih patuh terhadap norma, etika, serta tujuan organisasi. Individu dengan komitmen tinggi akan menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi, termasuk perilaku seperti kecurangan.

Komitmen organisasi juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi oleh anggota organisasi. Ketika nilai-nilai ini tertanam kuat, individu akan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan rasionalisasi terhadap perilaku menyimpang. Individu yang tidak memiliki komitmen cenderung menyalahkan faktor eksternal sebagai pembenaran atas perilaku menyimpang, termasuk kecurangan. Kecurangan berkaitan dengan yang dilakukannya untuk kepentingannya sendiri.

Penelitian yang dilakukan Rahmantari (2020) terhadap persepsi pegawai di OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut. Komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan yang dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara organisasi melakukan berbagai hal (Rahmantari, 2020). Hasil serupa juga di dapati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Fitriani (2016) terhadap pegawai di OPD Kabupaten

Jember yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan tindakan kecurangan.

H2: Komitmen organisasi Berpengaruh Terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kecurangan

Menurut Young dalam Pramudita (2013) pengertian Gaya kepemimpinan yaitu adalah sebagai bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Menurut COSO dalam Pramudita (2013) mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek gaya top manajemen sebagai tokoh pemimpin di dalam mencapai sasaran organisasi, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya. Hal itu dapat diargumentasikan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk mengikuti peraturan organisasi dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima. Hal tersebut berarti bahwa lingkungan yang etis dapat dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap kecurangan yang dilakukan pegawai.

Untuk membentuk lingkungan etis yang minim dari tindakan *fraud*, diperlukan figur pemimpin yang baik di mata pegawai. Jika pegawai memiliki persepsi negatif terhadap gaya kepemimpinan atasannya, mereka cenderung melakukan tindakan yang merugikan organisasi, seperti *fraud*, akibat tekanan non-keuangan (Cassey dalam Mustikasari, 2013). Hasil penelitian Rahmantari (2020) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada pegawai di OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian serupa oleh Jannah

(2024) di OPD Kota Bukittinggi juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan (*fraud*).

H3: Gaya kepemimpinan Berpengaruh Terhadap kecurangan pada sektor pemerintah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Siak yang berjumlah 43 OPD dan 129 responden. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu bendahara, kepala sub bagian keuangan, dan staff bagian keuangan dari setiap OPD. Adapun jumlah responden dalam sampel penelitian ini adalah 3 orang yang dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam pengelolaan keuangan di OPD Kabupaten Siak.

Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kecurangan pada sektor pemerintahan atau yang sering disebut *Fraud*.

Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Penegakan Peraturan, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan.

Tabel 1 Matriks Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	skala
1.	Kecurangan (Y)	Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau	1. Manipulasi 2. Pemalsuan dokumen 3. Penghilangan informasi	Likert

		memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2014)	4. Penggelapan aktiva 5. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi	
2.	Penegakan Peraturan (X1)	Penegakan peraturan dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberikan keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum. Penegakan peraturan lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya. Tanggung jawab penegak hukum dengan demikian bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual.	1. Ketaatan terhadap hukum 2. Proses penegakan peraturan 3. Peraturan organisasi 4. Disiplin kerja 5. Tanggung jawab	Likert
3.	Komitmen Organisasi (X2)	komitmen organisasi yaitu sikap mental individu yang berkaitan dengan tingkat kelayakannya terhadap organisasi tempat individu itu bekerja. Jika komitmen didalam organisasi itu tinggi dan dapat menjalin hubungan yang aktif dan saling mendukung maka akan mencapai tujuan organisasi tersebut.	1. bekerja melalui target 2. gembira memilih bekerja pada organisasi 3. menerima semua tugas 4. kesamaan nilai 5. bangga menjadi bagian organisasi.	Likert
4.	Gaya Kepemimpinan (X3)	Gaya kepemimpinan merupakan bentuk persepsi pegawai mengenai seorang pemimpin dalam proses mempengaruhi orang atau bawahan sehingga mereka akan berusaha, rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan kelompok.	1. Relasi pemimpin dengan anggota 2. Struktur tugas 3. Posisi kekuatan 4. Delegasi tugas 5. Etika pemimpin	Likert

Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang mengandalkan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis serta menarik kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dari sampel penelitian, kemudian diolah

menggunakan perangkat lunak SPSS 23 (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Data hasil olahan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan kesimpulan, yang berguna dalam pengambilan keputusan terhadap hasil penelitian. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan permasalahan ditelaah secara sistematis melalui kuantifikasi data, sehingga menghasilkan informasi objektif dan terukur.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan mengenai topik penelitian tertentu yang diberikan kepada responden, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang masalah dalam penelitian. Kuesioner yang diberikan adalah kuesioner langsung, dimana responden mengisi jawaban atas pertanyaan dikuesioner.

Kuesioner yang digunakan menggunakan skala Likert (*Likert Scale*) dengan skor 1-5. Skala Likert merupakan metode mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 104:104). Penelitian dalam kuesioner sebagai berikut:

1=Sangat Tidak Setuju (STS)

2=Tidak Setuju (TS)

3=Netral (N),

4=Setuju (S),

5=Sangat Setuju (SS)

Penelitian tersebut disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 2 Pengukuran Skala Likert

No	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Kuesioner

Tabel 3 Rincian OPD

No.	Keterangan	Total	Presentase
1.	Kuesioner yang disebar	129	100%
2.	Kuesioner yang kembali	120	93,02%
3.	Kusioner yang tidak kembali	9	6,98%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	120	93,02%

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Kuesioner disebar kepada 43 OPD dengan jumlah total 129 kuesioner yang disebar. Dari kuesioner yang disebar, kuesioner yang telah kembali berasal dari 40 OPD sebanyak 120 kuesioner, sedangkan yang belum kembali ada 3 OPD berjumlah 9 kuesioner.

Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Pengujian Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penegakan Peraturan	120	15,00	30,00	26,2833	2,81706
Komitmen Organisasi	120	7,00	30,00	23,9583	5,65298
Gaya Kepemimpinan	120	14,00	30,00	22,9417	3,30087
Kecurangan	120	6,00	13,00	8,4167	1,78501

Valid N (listwise)	120
-----------------------	-----

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel kecurangan memiliki jumlah data (N) 120 dengan nilai minimum 6 dan nilai maksimum 13 sedangkan nilai rata-rata (mean) 8,41, maka jumlah standar deviasinya adalah 1,78501 (dibawah rata-rata) yang berarti bahwa sebaran data adalah merata. Variabel penegakan peraturan memiliki jumlah data (N) 120 dengan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 30 sedangkan nilai rata-rata (mean) 26,28, maka jumlah standar deviasinya 2,81706 (dibawah rata-rata) yang berarti bahwa sebaran data adalah merata. Variabel komitmen organisasi memiliki jumlah data (N) 120 dengan nilai minimum 7 dan nilai maksimum 30 sedangkan nilai rata-rata (mean) 23,95, maka jumlah standar deviasinya 5,65298 (dibawah rata-rata) yang berarti bahwa sebaran data adalah merata. Variabel gaya kepemimpinan memiliki jumlah data (N) 120 dengan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 30 sedangkan nilai rata-rata (mean) 22,94, maka jumlah standar deviasinya 3,30087 (dibawah rata-rata) yang berarti bahwa sebaran data adalah merata.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Pengujian Noormalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,32535014
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,060
	Negative	-,064
Test Statistic		,064

Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}
------------------------	---------------------

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

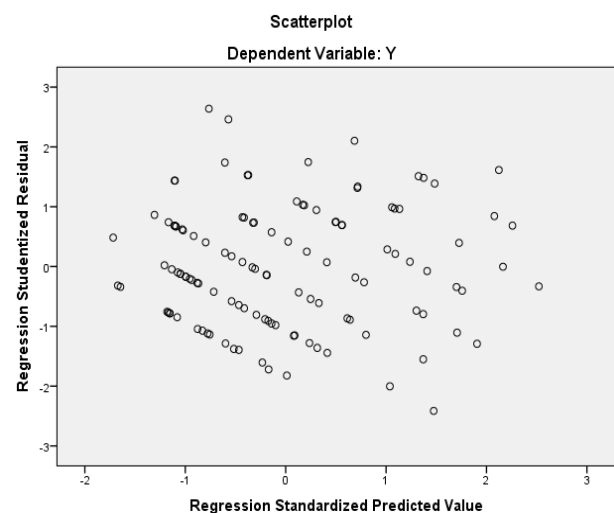
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Sesuai dengan uji Kolmogrov-Smirnov yang ditunjukkan oleh tabel tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi unstandardized residual atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Hasil Uji heteroskedastitas



Sumber: Data Olahan Primer 2025

Gambar 1

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan scatterplot dari variable dependen yaitu Kecurangan menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penegakan Peraturan	,965	1,036
	Komitmen Organisasi	,950	1,052
	Gaya Kepemimpinan	,978	1,022

a. Dependent Variable: Kecurangan

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat nilai $VIF < 10$, sedangkan nilai tolerance $> 0,1$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 7 Hasil Uji Validitas

Y			
Item	Nilai Signifikansi	P-Value	Keterangan
Y1	0,00	0,05	Valid
Y2	0,00	0,05	Valid
Y3	0,00	0,05	Valid
Y4	0,00	0,05	Valid
Y5	0,00	0,05	Valid
Y6	0,00	0,05	Valid
X1			
Item	Nilai Signifikansi	P-Value	Keterangan
X1.1	0,00	0,05	Valid
X1.2	0,00	0,05	Valid
X1.3	0,00	0,05	Valid
X1.4	0,00	0,05	Valid
X1.5	0,00	0,05	Valid
X1.6	0,00	0,05	Valid
X2			
Item	Nilai Signifikansi	P-Value	Keterangan
X2.1	0,00	0,05	Valid
X2.2	0,00	0,05	Valid

X2.3	0,00	0,05	Valid
X2.4	0,00	0,05	Valid
X2.5	0,00	0,05	Valid
X2.6	0,00	0,05	Valid
X3			
Item	Nilai Signifikansi	P-Value	Keterangan
X3.1	0,00	0,05	Valid
X3.2	0,00	0,05	Valid
X3.3	0,00	0,05	Valid
X3.4	0,00	0,05	Valid
X3.5	0,00	0,05	Valid
X3.6	0,00	0,05	Valid

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan untuk setiap variabel dalam kuesioner adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (*p-value*) dari setiap item pernyataan $< 0,05$. Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas, yaitu untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan mampu merepresentasikan variabel yang diukur, maka nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara setiap item dengan total skor signifikan secara statistik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden merupakan alat ukur yang tepat. Jika *p-value* $< 0,05$, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Realiabilitas

Tabel 8 Hasil Uji Reabilitas

Item	Cronbach's Alpha
Y	0.716
X1	0.769
X2	0.814
X3	0.788

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Berdasarkan hasil pengujian reabilitas di atas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai

instrumen adalah reliabel atau dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	21,363	1,551		13,771
	X1	-,238	,044	-,375	-5,345
	X2	-,150	,022	-,476	-6,734
	X3	-,135	,038	-,250	-3,580

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Dari tabel 5.11 hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka didapatkan model persamaan regresi akhir sebagai berikut: $Y = a + \beta_1X + \beta_2X + \beta_3X + e$, maka $Y = 21,363 + (-0,238)X + (-0,150)X + (-0,135)X + e$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta = 21,363 menunjukkan bahwa jika variabel (X) bernilai 0 (nol) maka (Y) bernilai sebesar 21,363
2. Nilai koefisien regresi variabel (X1) adalah -0,238 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan

menurunkan variabel (Y) sebesar -0,238.

3. Nilai koefisien regresi variabel (X2) adalah -0,150 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X2) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan variabel (Y) sebesar -0,150

4. Nilai koefisien regresi variabel (X3) adalah -0,135 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X3) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menurunkan variabel (Y) sebesar -0,135.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji T

Tabel 10

Model	t Tabel	t hitung	Sig	Keterangan
Penegakan Peraturan	1,9804	-5,345	0,000	Diterima
Komitmen Organisasi	1,9804	-6,734	0,000	Diterima
Gaya Kepemimpinan	1,9804	-3,580	0,001	Diterima

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Dari hasil output pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai t hitung Penegakan Peraturan yaitu sebesar -5,345 lebih kecil dari nilai t tabel (-5,345 < 1,9804) dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 atau (0,000 > 0,05) maka variabel bebas independen Penegakan Peraturan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel terikat Kecurangan.
2. Nilai t hitung Komitmen Organisasi yaitu sebesar -6,734 lebih kecil dari nilai t tabel (-6,734 < 1,9804) dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau (0,000 < 0,05) maka variabel bebas independen Komitmen Organisasi berpengaruh

signifikan negatif terhadap variabel terikat Kecurangan.

3. Nilai t hitung Gaya Kepemimpinan yaitu sebesar $-3,580$ lebih kecil dari nilai t tabel ($-3,580 < 1,9804$) dengan nilai signifikannya sebesar $0,001$ lebih kecil dari $0,05$ atau ($0,001 < 0,05$) maka variabel bebas independen Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel terikat Kecurangan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,670 ^a	,449	,434	1,34238

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan Primer 2025

Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar $0,449$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3, sebesar $44,9\%$ sedangkan sisanya $55,1\%$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu pernyataan bahwa penegakan peraturan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 menyatakan bahwa nilai penegakan peraturan terhadap tindak kecurangaan akuntansi pada sektor pemerintah memiliki nilai t hitung $-5,345 < t$ tabel $1,9804$ dengan nilai signifikannya

$0,000$, yang berarti semakin tinggi Efektivitas Penegakan Peraturan pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak maka akan mengurangi tingkat kecurangan yang akan terjadi, sebaliknya apabila semakin rendah Efektivitas Penegakan Peraturan pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak maka akan semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang akan terjadi.

Sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Muslim (2024) yang menunjukkan bahwa keefektifan penegakan peraturan berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), artinya semakin tinggi persepsi pegawai mengenai penegakan peraturan di suatu pemerintahan, maka dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan di sektor pemerintahan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Saputro (2020) terhadap pegawai di Pemerintah Kota Mojokerto yang menyatakan bahwa penegakan hukum berperan penting dalam menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa semakin tingginya penegakan peraturan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Siak, maka tingkat kecurangan yang terjadi akan semakin menurun.

Pengaruh Komitmen organisasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu pernyataan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 menyatakan bahwa nilai komitmen organisasi terhadap tindak kecurangaan akuntansi pada sektor pemerintah memiliki nilai t hitung $-6,734 < t$ tabel $1,9804$ dengan nilai signifikannya $0,000$ atau nilai signifikannya adalah $< 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya komitmen organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan. Dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi rasa Komitmen Organisasi pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak maka akan mengurangi tingkat kecurangan yang akan terjadi, sebaliknya apabila semakin rendah rasa Komitmen Organisasi pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak maka akan semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang akan terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmantari (2020) yang meneliti persepsi pegawai di OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di mana diketahui bahwa semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam organisasi tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian Herawati dan Susanto (2017) juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku *fraud*, di mana pegawai dengan komitmen tinggi cenderung menjauhi tindakan tidak etis. Sementara itu, Yuliani (2020) menegaskan bahwa komitmen organisasi tidak hanya menurunkan niat untuk melakukan kecurangan, tetapi juga berdampak langsung dalam membentuk integritas dan tanggung jawab moral ASN. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin tingginya rasa komitmen organisasi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam organisasi tersebut.

Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu pernyataan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 menyatakan bahwa nilai gaya kepemimpinan terhadap tindak kecurangan akuntansi pada sektor pemerintah memiliki nilai t hitung $-3,580 < t$ tabel 1,9804 dengan nilai signifikannya

0,001 atau nilai signifikannya adalah $<0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat atau efektif gaya kepemimpinan yang diterapkan pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak, maka tingkat kecurangan yang terjadi akan semakin rendah. Sebaliknya, jika gaya kepemimpinan yang diterapkan lemah, tidak tegas, atau tidak memiliki integritas, maka potensi terjadinya kecurangan akan meningkat. Gaya kepemimpinan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada etika cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih akuntabel dan minim peluang terjadinya penyimpangan seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran, atau bentuk kecurangan lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmantari (2020) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai di OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Senada dengan temuan Jannah (2024) di OPD Kota Bukittinggi yang juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin tinggi kualitas gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan yang terjadi dalam organisasi tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penegakan Peraturan terhadap kecurangan pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 23, ditemukan bahwa Penegakan Peraturan memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan. Artinya,

semakin tinggi efektivitas penegakan peraturan di OPD tersebut, semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi. Sebaliknya, apabila efektivitas penegakan peraturan rendah, maka tingkat kecurangan cenderung meningkat.

Selanjutnya, Komitmen Organisasi juga berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada OPD Pemerintah Kabupaten Siak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa komitmen organisasi dari para pegawai, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Sebaliknya, apabila komitmen organisasi rendah, maka potensi terjadinya kecurangan akan semakin besar.

Terakhir, Gaya Kepemimpinan di OPD Pemerintah Kabupaten Siak juga terbukti berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Semakin kuat dan dominan gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka tingkat kecurangan dapat ditekan dan berkurang. Namun, jika gaya kepemimpinan kurang dominan atau kurang kuat, maka risiko terjadinya kecurangan menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, penegakan peraturan, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mengurangi kecurangan di sektor pemerintahan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel lain diluar penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup objek maupun subjek penelitian sehingga tidak terfokus pada satu wilayah saja, agar hasil penelitian diteliti secara luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode wawancara agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih

mendalam dan menyesuaikan jawaban dari responden sesuai konteks. Selain itu, disarankan untuk menggunakan dan meninjau literatur terbaru agar hasil penelitian lebih relevan dengan perkembangan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., Komala, A. R., & Arum, R. F. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Etika terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(1), 42–55.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud examination (4th ed.)*. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing and assurance services: An integrated approach (13th ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Chandra, H., Zain, M., & Huda, M. (2015). *Manajemen Organisasi Sektor Publik: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- CNN Indonesia. (2023, Mei 4). *Kerugian Negara Capai Rp300 T dari Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung*.
- Fitriani, Siti Afsari. (2016). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori *Fraud Triangle*: Persepsi Pegawai Pemerintahan (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Jember)” . Skripsi
- Herawati, N., & Susanto, A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Perilaku *Fraud* Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal*

- Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 291–306.
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jannah, R. (2024). *Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tindak kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi* [Skripsi, UIN Suska Riau].
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 36–43. Universitas Negeri Semarang.
- Pratiwi, M. A., & Muslim, R. Y. (2024). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan pada laporan keuangan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 25(1).
- Rahmantari, A. (2020). *Pengaruh penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, keadilan organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)*. [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Rakyat45.com. (2025, Maret 26). *Korupsi dana bencana, mantan Kalaksa BPBD Siak divonis 6 tahun*. [https://rakyat45.com/2025/03/26/k](https://rakyat45.com/2025/03/26/korupsi-dana-bencana-mantan-kalaksa-bpbd-siak-divonis-6-tahun)
- orupsi-dana-bencana-mantan-kalaksa-bpbd-siak-divonis-6-tahun
- Saputro, R. A. (2020). *Pengaruh komitmen organisasi, efektivitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, budaya etis organisasi, dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Suara.com. (2025, Maret 26). *Kepala BPBD Siak divonis 6 tahun penjara, denda Rp100 juta di kasus korupsi dana bencana*. <https://riau.suara.com/read/2025/03/26/144205/kepala-bpbd-siak-divonis-6-tahun-penjara-denda-rp100-juta-di-kasus-korupsi-dana-bencana>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliani, R. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Integritas dan Tanggung Jawab Moral ASN di Pemerintahan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 85–92.